



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat disusun. Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan.

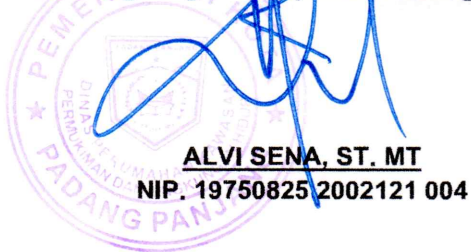
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan suatu bentuk tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan serta rumusan indikator kinerja yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan terukur secara kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan Program kegiatan yang selama ini berorientasi pada indikator kinerja output dan realisasi keuangan sudah lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian target kinerja hasil yang terukur dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya besar harapan Kami penyusunan Rencana Kerja ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh Aparatur Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang



ALVI SENA, ST. MT
NIP. 197508252002121 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023, Capaian Renstra Tahun 2018- 2023 dan Renstra 2024-2026	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	46
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	55
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah	60
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	85
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	85
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	85
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	86
3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025	88
3.1.4 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	92
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	95
3.3 Program dan Kegiatan	97
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	118
BAB V PENUTUP	138

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2024 (Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018 s/d 2023).....	8
2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026)	20
2.3	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d 2024	36
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (berdasarkan Renstra 2018-2023)	47
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (berdasarkan Renstra 204-2026	51
2.6	Pemetaan Permasalahan Renstra 2024-2026	56
2.7	Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	59
2.8	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025	62
2.9	Usulan Program,dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	74
3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	87
3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025	90
3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	97
3.4	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang	101
4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas
2. Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

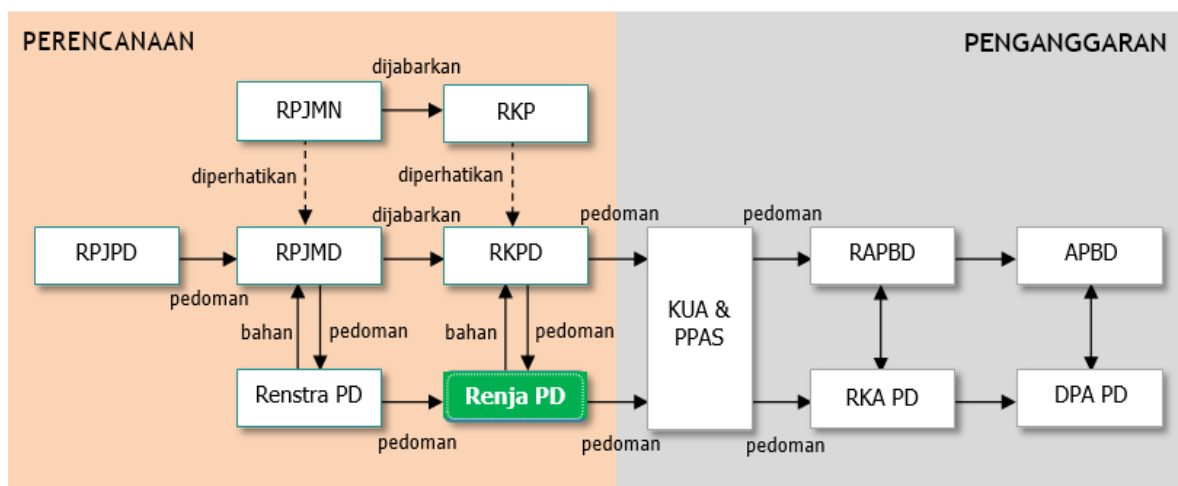
1. Persiapan penyusunan
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan OPD
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
 - k. Pembahasan forum OPD
3. Penyusunan rancangan
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bappeda Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Bappeda.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Dinas Peumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang



Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembar Daerah tahun 2013 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang

- Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Padang panjang tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Padang Panjang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah tangga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 29);
 21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 64).
 22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
 23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun $n+1$

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023, Capaian Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra 2024-2026

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
(Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023)
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	37 orang	37 orang	37 orang	37 orang	100%			

X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%			
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	21 jenis	21 jenis	21 jenis	17 jenis	81%			
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	58 jenis, 2 unit	58 jenis, 2 unit	58 jenis, 2 unit	58 jenis, 2 unit	100%			
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis 29928 ok	12 Jenis 16307 ok	13 Jenis 9976 ok	8 Jenis 2600 ok	62%			
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3099 ok	2042 ok	1033 ok	1021 ok	100%			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%	100%	100%			
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	1 unit	-	1 Unit	1 Unit	100%			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 rekening	48 rekening	48 rekening	48 rekening	100%			
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			

X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Perorangan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	11 Unit	11 Unit	100%			
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6 Unit	6 unit	6 Unit	4 Unit	67%			
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	97,90%	94,96%	97,90%		101%			
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah								
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus								
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	10 Unit	5 Unit	5 Unit, 2 unit	0 Unit, 02 unit	100%			
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit	5 Unit	5 Unit	0 Unit	100%			
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			2 unit	0 unit	100%			

1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%			
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%			
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	100%	73,59%	81.76%	82,82%	101,30%			
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia								
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi								
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh								
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	20 Kali	23 kali	1 laporan	1 laporan	100%			
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	100%	73,59%	81,76%	82,82%	101%			

1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	299 Unit	40 unit	122 unit	122 unit	100%			
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki								
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	100%	86%	91%	91%	100%			
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 kecamatan	2 kecamatan, 11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Draenase	2 kecamatan, 9 Paket Jalan, 4 Paket Draenase, 13 Paket DAM	2 kecamatan, 2 Paket Jalan, 2 Paket Draenase, 1 Paket DAM	100%			
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	2 kecamatan, 11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Draenase	2 kecamatan, 9 Paket Jalan, 4 Paket Draenase, 13 Paket DAM	2 kecamatan, 2 Paket Jalan, 2 Paket Draenase, 1 Paket DAM	100%			
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%			
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	5 dokumen	2 dokumen						
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%			
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	1 dokumen			100%			

02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	32-29%	28,57%	14,29%	20%	140%			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan								
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan								
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	9 kampung iklim	9 kampung iklim	9 kampung	9 kampung	100%			
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%			
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	2 data, 1 sungai	3 data, 1 sungai	4 data, 1 sungai	4 data, 1 sungai	100%			
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 data, 1 sungai	3 data, 1 sungai	4 data, 1 sungai	4 data, 1 sungai	100%			

02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik								
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola								
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lokasi dan 2 kecamatan	3 lokasi Taman dan 2 kecamatan	4 lokasi Pemeliharaan Taman , 47 Ha	4 lokasi, 47 Ha	100%			
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3								
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan								
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3								
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	20 Fasyankes	20 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	100%			

2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	20 Fasyankes	20 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	100%			
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan								
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	105 Kegiatan	25 laporan	26 laporan	100%			
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 Kegiatan	105 Kegiatan	25 laporan	26 laporan	100%			
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya								
02.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH								

2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH								
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH								
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan								
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan								
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat								

2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana								
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan								
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat								
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH								
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	2 jenis	2 jenis	2 jenis	1 jenis	50%			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	45 kali Pembinaan	85 kali Pembinaan, 2 Jenis	60 kali Pembinaan, 1 Jenis	60 kali Pembinaan, 1 Jenis	100%			
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH								
		Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup								

02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani									
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)									
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani									
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota									
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah									
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah									
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kali	6 kali	4 kali	0 kali	0%				
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			1 Dokumen, 3 Jenis	1 Dokumen, 3 Jenis	100%				

2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	100%			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	183 org	185 orang	173 orang	173 orang	100%			
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi								
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota								

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
(Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026)
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2024	
					Target Renja OPD tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =9	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90%					90,00%	90,00%	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100,00%					100 persen	100 persen	100%
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2016 Orang/bulan					672 Orang/bulan	672 Orang/bulan	100%

X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%					100 persen	100 persen	100%
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket					48 Paket	48 Paket	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 persen					90 persen	90 persen	100%
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket					8 Paket	8 Paket	100%
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket					8 Paket	8 Paket	100%
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket					24 Paket	24 Paket	100%
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan					24 Laporan	24 Laporan	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 persen					100 persen	100 persen	100%
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit					0 Unit	0 Unit	100%
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit					0 Unit	0 Unit	100%
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit					3 Unit	3 Unit	100%
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit					0 Unit	0 Unit	100%

X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen					90 persen	90 persen	100%
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan					60 Laporan	60 Laporan	100%
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan					24 Laporan	24 Laporan	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 persen					95 persen	95 persen	100%
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit					1 Unit	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit					12 Unit	12 Unit	100%
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit					30 Unit	30 Unit	100%
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit					2 Unit	2 Unit	100%

01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%					100,00%	100,00%	100%
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	6 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100%
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	12 unit					4 unit	4 unit	100%
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah					2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	100%
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6 Unit Rumah					2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	100%
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%

01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	100%					89,36%	89,36%	100%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	3 laporan					1 laporan	1 laporan	100%
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	98%					96,62%	96,62%	100%
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	210 unit					70 unit	70 unit	100%

1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	210 Unit Rumah					70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	100%
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87.98 %					86,24%	86,24%	100%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	6 kecamatan					2 kecamatan	2 kecamatan	100%
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6 Lokasi					2 Lokasi	2 Lokasi	100%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%					100,00%	100,00%	100%
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	3 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	100%
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100%					100,00%	100,00%	100%
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis					2 jenis	2 jenis	100%
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2 Dokumen					0 Dokumen	0 Dokumen	100%
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	6 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis					1 jenis	1 jenis	100%
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan					4 Laporan	4 Laporan	100%

02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	4,23%					4,23%	4,23%	100%
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan					2 kecamatan	2 kecamatan	100%
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	159 Ha					53 Ha	53 Ha	100%
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	120 Orang					40 Orang	40 Orang	100%
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	35%					32,00%	32,00%	100%
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan	74 fasyankes					24 fasyankes	24 fasyankes	100%
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%

2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	6 kali					2 kali	2 kali	100%
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	65%					55,00%	55,00%	100%
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100 persen					100 persen	100 persen	100%
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 Badan Usaha					30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	100%
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	11 Orang					2 Orang	2 Orang	100%

02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	100%					50,00%	50,00%	100%
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	2 dokumen					- dokumen	- dokumen	100%
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen					- Dokumen	- Dokumen	100%

02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%					100,00%	100,00%	100%
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	9 jenis kegiatan					3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	100%
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	9 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	48 Orang					16 Orang	16 Orang	100%
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga					1 Lembaga	1 Lembaga	100%
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	3 Jenis					1 Jenis	1 Jenis	100%
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	3 kelompok					1 kelompok	1 kelompok	100%

2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas					1 Entitas	1 Entitas	100%
		Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup	3 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%					100,00%	100,00%	100%
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	15 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	100%
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Dokumen					5 Pengaduan	5 Pengaduan	100%
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Dokumen					5 Perkara	5 Perkara	100%

02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98%					98%	98%	100%
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	78 persen					80%	80%	100%
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	21 Kelompok					7 Kelompok	7 Kelompok	100%
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	67 Unit					22 Unit	22 Unit	100%
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton					15000-20000 Ton	15000-20000 Ton	100%
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	3 pihak swasta					1 pihak swasta	1 pihak swasta	100%
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	3 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 dan 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 melaksanakan 11 Program 17 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi dengan target 100% capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan 11 sub kegiatan yang dilaksanakan dengan persentase capaian kinerja 100%.
2. Program Pengembangan Perumahan indikator Program Persentase Permukiman Layak Huni dengan target 97,90 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 97,90%, Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian kinerja 100%.
3. Program Kawasan Permukiman, indikator Program Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh dengan target 81,76 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 82,82%, melebihi target karena adanya peningkatan pada tahun ini berdasarkan adanya kegiatan RTLH dan PSU Tahun 2023 Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian kinerja 101%.
4. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), indikator Program ini Persentase Ketersediaan PSU dengan target 91 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 91%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian kinerja 100%.
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, indikator Program Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan dengan target 100 % capaiannya kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian kinerja 100%.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, indikator Program Persentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemar Sedang dengan target 14,29 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 20%. Capaian dari Program ini melebihi target dikarenakan pengujian sebelumnya dilakukan terhadap tujuh sungai dikurangi menjadi lima sungai di Kota Padang Panjang. Pengurangan ini merupakan penyesuaian yang diakomodir oleh Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH yang menyatakan bahwa sungai yang dipantau mewakili 50% dari sungai yang ada di wilayah administrasi, yang diusulkan melalui Surat Klarifikasi Target IKLH oleh Walikota Padang Panjang kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta disetujui oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI. Sekaligus dilakukan penyesuaian titik pantau untuk menentukan lokasi pengambilan sampel pada sungai di Kota Padang Panjang. Sehingga didapati Cemar Sedang menjadi 20% atau 1/5 dengan uraian Cemar Ringan untuk empat sungai, yakni Batang Sibunian, Batang Sikakeh, Sungai Talang, dan Sungai Andok serta Cemar Sedang untuk satu sungai Batang Bakarek-Karek. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian kinerja 140%.

7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), indikator Program Persentase Ketersediaan Dokumen KEHATI dengan target 100% capaian kinerja tahun 2023 sebesar 66%, Target Program tidak tercapai disebabkan karena Pada tahun ini penyediaan dokumen KEHATI tidak tersedia disebabkan adanya keterbatasan Anggaran, sehingga realisasinya sama dengan tahun lalu (66%), dan tahun 2024 kegiatannya juga tidak ada, Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian kinerja 66%.
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), indikator Program Persentase Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes target 50% capaian kinerja tahun 2023 sebesar 51%, (melebihi target) karena Pada Indikator Program ini tidak ada mengalami masalah, karena Capaian realisasi kegiatan meningkat karena kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada fasyankes, yang terlebih dahulu diidentifikasi memerlukan pembinaan dari Dinas Perkim LH dan dipastikan tiap fasyankes yang menjadi sasaran program kegiatan adalah dengan memastikan diberikannya rekomendasi penyelesaian permasalahan masing-masing fasyankes. untuk selanjutnya pembinaan dilakukan dengan pemantauan lapangan. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian Kinerja 102%.
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) indikator Program Persentase Tingkat Ketaatan Izin Lingkungan dan/atau SPPL dengan target 65% capaian kinerja tahun 2023 sebesar 55,60%, Target tidak tercapai disebabkan karena kewajiban pemantauan air bersih/limbah melalui laboratorium di kembalikan ke pelaku usaha/kegiatan, sebelumnya pemantauan air bersih/limbah dibantu oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan , persentase capaian kinerja 86%
10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun ini kita hanya mendapatkan Penghargaan Adiwiyata, sementara untuk Penghargaan adipura belum bisa didapatkan tahun ini, karena adanya pengunduran jadwal penilaian dari TIM Kementerian LHK, dan rencananya mereka akan datang menilai ke Kota Padang Panjang sekitar bulan Februari tahun 2024, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan.
11. Program Pengelolaan Persampahan Indikator Program Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, dengan target 72% dan capaian kinerja 82,20%, Realisasi rendah disebabkan bahwa belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya penanganan sampah, akan tetapi kita terus dan selalu mengupayakan pengurangan sampah di tahun 2023 ini, dan Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga dengan target 28% dan realisasi 16,26%, Realisasi rendah disebabkan bahwa belum optimalnya peran serta berbagai pihak dalam upaya pengurangan sampah, akan tetapi kita terus dan selalu mengupayakan pengurangan sampah di tahun 2023 ini. yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub kegiatan, persentase capaian kinerja 90%.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan
Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/5	6	7	8=7/6
1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	25.262.976.910	24.396.383.244,62	96,57%	32.448.327.088	32.448.327.088	100,00%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.836.076.053	6.628.751.138	96,97%	7.413.285.065	7.413.285.065	100,00%
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.441.212.998	5.361.431.213	98,53%	5.912.148.885	5.912.148.885	100,00%
1 04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.441.212.998	5.361.431.213	98,53%	5.912.148.885	5.912.148.885	100,00%
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		23.500.000	23.500.000	100,00%
1 04 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		23.500.000	23.500.000	100,00%

1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.941.460	478.005.630	96,58%	493.212.600	493.212.600	100,00%
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.869.860	8.323.100	93,84%	8.608.800	8.608.800	100,00%
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.227.000	73.428.700	88,23%	82.736.200	82.736.200	100,00%
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.839.500	16.792.900	73,53%	21.321.600	21.321.600	100,00%
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.005.100	379.460.930	99,86%	380.546.000	380.546.000	100,00%
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		58.336.000	58.336.000	100,00%
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-		58.336.000	58.336.000	100,00%
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.844.000	574.232.077	91,90%	602.108.580	602.108.580	100,00%
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.532.000	41.937.153	81,38%	52.288.580	52.288.580	100,00%
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.312.000	532.294.924	92,85%	549.820.000	549.820.000	100,00%
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.077.595	215.082.218	78,19%	323.979.000	323.979.000	100,00%
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.390.500	31.738.650	64,26%	74.967.000	74.967.000	100,00%
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.757.095	136.084.900	85,18%	142.910.000	142.910.000	100,00%

1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.930.000	7.337.600	28,30%	31.330.000	31.330.000	100,00%
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	39.921.068	99,80%	74.772.000	74.772.000	100,00%
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	346.508.544	231.073.068	66,69%	562.553.736	562.553.736	100,00%
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-		-	-	
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	-				
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-				
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	83.914.000	-	0,00%	104.960.000	104.960.000	100,00%
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	56.940.000	-	0,00%	44.960.050	44.960.050	100,00%
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	26.974.000	-	0,00%	59.999.950	59.999.950	100,00%
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	262.594.544	231.073.068	88,00%	457.593.736	457.593.736	100,00%
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	262.594.544	231.073.068	88,00%	457.593.736	457.593.736	100,00%

1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.571.717.160	2.550.243.840	99,17%	135.621.900	135.621.900	100,00%
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-		98.709.750	98.709.750	100,00%
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	-	-		98.709.750	98.709.750	100,00%
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	-				
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.571.717.160	2.550.243.840	99,17%	36.912.150	36.912.150	100,00%
1	04	03	2.03		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.552.998.760	2.531.923.140	99,17%			#DIV/0!
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	18.718.400	18.320.700	97,88%	36.912.150	36.912.150	100,00%
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-		2.561.117.300	2.561.117.300	100,00%
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-		2.561.117.300	2.561.117.300	100,00%
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-		2.561.117.300	2.561.117.300	100,00%
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.046.641.463	3.895.228.841,62	96,26%	6.221.473.543	6.221.473.543	100,00%
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.046.641.463	3.895.228.841,62	96,26%	6.221.473.543	6.221.473.543	100,00%
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.046.641.463	3.895.228.841,62	96,26%	6.221.473.543	6.221.473.543	100,00%

2	11	05			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	144.637.650	140.300.600	97,00%	267.464.600	267.464.600	100,00%
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		22.697.900	20.277.025	89,33%	-	-	
2	11	02	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	22.697.900,00	20.277.025	89,33%			
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		121.939.750	120.023.575	98,43%	267.464.600	267.464.600	100,00%
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	121.939.750	120.023.575	98,43%	122.623.600	122.623.600	100,00%
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				144.841.000	144.841.000	100,00%
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	335.436.040	314.206.064	93,67%	443.897.123	443.897.123	100,00%
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		315.806.240	294.923.714	93,39%	425.770.873	425.770.873	100,00%
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				16.010.100	16.010.100	100,00%
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	26.828.600	23.385.450	87,17%	28.797.000	28.797.000	100,00%
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	288.977.640	271.538.264	93,97%	380.963.773	380.963.773	100,00%

2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	19.629.800	19.282.350	98,23%	18.126.250	18.126.250	100,00%
2	11	03	2.02		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	19.629.800	19.282.350	98,23%	18.126.250	18.126.250	100,00%
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.991.553.600	1.951.518.498	97,99%	2.076.546.250	2.076.546.250	100,00%
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.991.553.600	1.951.518.498	97,99%	2.076.546.250	2.076.546.250	100,00%
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.991.553.600	1.951.518.498	97,99%	2.048.429.850	2.048.429.850	100,00%
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				28.116.400	28.116.400	100,00%
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.131.000	6.491.700	79,84%	20.963.900	20.963.900	100,00%
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	0,00%	6.433.400	6.433.400	100,00%
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3				6.433.400	6.433.400	100,00%
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.131.000	6.491.700	79,84%	14.530.500	14.530.500	100,00%
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	8.131.000	6.491.700	79,84%	14.530.500	14.530.500	100,00%

2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			15.553.850	14.575.250	93,71%	23.585.300	23.585.300	100,00%	
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			15.553.850	14.575.250	93,71%	23.585.300	23.585.300	100,00%
2	11	06	2.01	0003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lunkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota			15.553.850	14.575.250	93,71%		
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					23.585.300	23.585.300	100,00%
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			-	-		19.999.850	19.999.850	100,00%	
2	11	07	2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			-	-		19.999.850	19.999.850	100,00%
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					19.999.850	19.999.850	100,00%
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-	-		223.999.950	223.999.950	100,00%	
2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-		223.999.950	223.999.950	100,00%

2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					30.000.000	30.000.000	100,00%
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					10.000.000	10.000.000	100,00%
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat					183.999.950	183.999.950	100,00%
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	115.149.600	104.858.400	91,06%		93.362.600	93.362.600	100,00%
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115.149.600	104.858.400	91,06%		93.362.600	93.362.600	100,00%
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	115.149.600	104.858.400	91,06%		93.362.600	93.362.600	100,00%
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			19.723.300	19.723.300	100,00%
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			19.723.300	19.723.300	100,00%
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	-	-			11.103.350	11.103.350	100,00%
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	-			8.619.950	8.619.950	100,00%
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.851.571.950	8.559.135.845	96,70%		12.364.732.671	12.364.732.671	100,00%
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	8.851.571.950	8.559.135.845	96,70%		12.364.732.671	12.364.732.671	100,00%
2	11	11	2.01	0003	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.171.040.214	6.062.747.926	98,25%				

2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	-	0,00%	40.000.000	40.000.000	100,00%
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.523.347.936	1.367.132.405	89,75%	9.150.000	9.150.000	100,00%
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.157.183.800	1.129.255.514	97,59%	6.508.403.081	6.508.403.081	100,00%
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-	-	0,00%	5.807.179.590	5.807.179.590	100,00%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 11 Program 17 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangannya dibawah 75% dan sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, yang ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan Administrasi Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 22.839.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.792.900,- (73,53%). Persentase Realisasi Keuangan hanya mencapai 73,53 % hal ini disebabkan tidak banyanya biaya foto copy dan biaya cetak pada tahun ini teralisasi bila dibandingkan tahun lalu (sesuai kebutuhan). Hasil dari kegiatan ini tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan dokumen/persuratan selama 1 tahun.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang ditujukan untuk pemeliharaan operasional roda 4, (pembayaran pajak), STNK serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 49.390.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.738.650,- (64,26). Presentase Realisasi Keuangan hanya mencapai 64,26 % hal ini disebabkan tidak banyaknya biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan pada tahun ini teralisasi bila dibandingkan tahun lalu (sesuai kebutuhan). Hasil dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan Dinas Jabatan roda 4 sebanyak 1 unit.
- Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditujukan untuk Kelancaran Pelaksaaan Administrasi dan Pelayanan Kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 25.930.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.337.600,- (28,30%). Persentase Realisasi Keuangan hanya mencapai 28,30 % hal ini disebabkan tidak banyaknya biaya jasa servis peralatan Printer, komputer (PC dan laptop) pada tahun ini teralisasi bila dibandingkan tahun lalu (sesuai kebutuhan).Hasil dari kegiatan ini adalah berupa jasa servis peralatan Printer, komputer (PC dan laptop), perbaikan selama 1 tahun
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana yang ditujukan untuk Pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana, kegiatan fisik mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp.56.940.000,- dan realisasi keuangan Rp. 0- (0%), rendahnya realisasi keuangan karena disebabkan kegiatan ini bersifat Situasional yang sipat pekerjaannya sudah direncanakan, seandainya ada masyarakat yang patut dibantu. Hasil kegiatan ini adalah, pada tahun ini tidak ada rumah masyarakat yang dibantu.

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana dan atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk Pemenuhan SPM Perumahan dan sebagai dana cadangan bantuan Pemerintah Daerah terhadap Korban Bencana, kegiatan fisik mencapai 100% dengan jumlah dana Anggaran sebesar Rp. 26.974.000 dan realisasi keuangan Rp. 830.000- (0%), rendahnya realisasi keuangan karena disebabkan kegiatan ini bersipat Situasional yang sipat pekerjaannya sudah direncanakan, seandainya ada masyarakat yang patut dibantu. Hasil kegiatan ini adalah, pada tahun ini tidak ada rumah masyarakat yang dibantu.
- Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Pada Kegiatan ini anggarannya dihilangkan di Perubahan, disebabkan karena Padatnya Pelaksanaan kegiatan di Bidang PSPP serta focus ke pemecahan masalah (solusi) terhadap, penanganan TPA Sungai Andok.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kota Padang Panjang adalah melaksanakan fungsi sebagai urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup.

Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator kinerja sasaran yakni, “persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2023 dengan target sebesar 73%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup
(berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023)

1	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeks i (Tahun)		Catat an Anali sis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Insfratraktur			1,39 %	1,5%							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		V	72,6 5	72,8 7			66,6 0%				
	Persentase Permukima n Layak Huni			97,0 1%	97,9 0%			97,0 1%	97 %			
	Persentase penguranga n kawasan kumuh			30%	40%			73.9 8%	74 %			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	V		100 %	100 %			100 %	100 %			

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	V		100%	100%			100%	100%			
Persentase ketersediaan PSU Kawasan Permukiman yang sesuai standar		V	88%	91%			85%	86%			
Indeks Kualitas Udara (IKU)			89,11%	89,22%			91,29%	91,60%			
Indeks Kualitas Air (IKA)			55,89%	55,89%			44,07%	47%			
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			70,79%	71,64%			56,18%	62%			
Persentase dokumen perencanaan lingkungan			100%	100%				100%			
Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan			28,57%	14,29%							
Persentase Ketersediaan RTH Publik			2,9%	3%			4,23%	4,23%			

	Persentase Ketersediaan Dokumen KEHATI			100 %	100 %				66%			
	Persentase Limbah B3 Faysiankes			26-30%	31-35%			38%	51%			
	Tingkat ketaatan Penerapan Izin Lingkungan		V	60%	65%			62,68 %	56%			
	Persentase Penyuluhan dan infomasi Lingkungan Hidup			100 %	100 %							
	Jumlah Jenis Penghargaa n di Bidang Lingkungan Hidup			2	2				2			
	Presentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		V	73%	72%			82,72 %	89,65 %			
	Presentase Penguranga n Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		V	27%	28%			15,17 %	15%			

2	Prevalensi Stunting			15,51%	13,98%							
	Cakupan Layanan pengelolaan Limbah B3 Fasyankes			100%	100%							
	Persentase Limbah B3 Fasyankes			26-30%	31-35%			51%				
3	Indeks Gini			0,308%	0,307%							
	Tingkat Kemiskinan			5,79%	5,65%							
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau		V	84,38%	86,80%							
	Rasio Rumah Layak Huni		V	96,21%	97,10%			97%				

Tabel 2.5

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
(berdasarkan Renstra 2024-2026)**

	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisas i Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catat an Anali sis
				20 22	20 23	2024	2025	20 22	20 23	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	IKLI Perkim		√			96,8 5	96,9 0			96,8 5	96,9 0	
2	Indeks Kualitas Lingkung an Hidup (IKLH)					66,6 0	66,7 6			66,6 0	66,7 6	
	Presenta se Permuki man layak Huni		√			98,8 0%	99,5 2%			98,8 0%	99,5 2%	
	Persenta se Pengura ngan Kawsan Kumuh					89,3 6%	95,7 4%			89,3 6%	95,7 4%	
	Presenta se Ketersedi aan PSU Kawasan Permuki man dalam Kondisi baik					86,2 4%	87,1 1%			86,2 4%	87,1 1%	

Presentase rumah korban bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		√			100%	100%			100%	100%	
Indeks Kualitas Air (IKA)					46,07 %	46,50 %			46,07 %	46,50 %	
Indeks Kualitas Udara (IKU)					91,29 %	91,29 %			91,29 %	91,29 %	
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)					56,18 %	56,18 %			56,18 %	56,18 %	
Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup yang dilakukan		√			85%	90%			85%	90%	
Presentase dokumen perencanaan lingkungan					100%	100%			100%	100%	
presentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang Tertangani					100%	100%			100%	100%	

Presentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan					55%	60%			55%	60%	
Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH (Pendataan pendampingan)					50%	100%			50%	100%	
Persentase Penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat					100%	100%			100%	100%	
Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat					1 jenis	1 jenis			1 jenis	1 jenis	
Persentase kegiatan pencegahan pengulangan pencemaran dan garing atau kerusakan lingkungan hidup					100%	100%			100%	100%	
Persentase luas RTH Publik					4,23 %	4,23 %			4,23 %	4,23 %	

	Persentase Pembinaan/Verifikasi Lapangan Terhadap Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3					32%	32%			32%	32%	
	Persentase Pengelolaan Sampah					98%	98%			98%	98%	
2	Angka Kemiskinan											
	Persentase Permukiman Layak huni					98,80 %	99,52 %			98,80 %	99,52 %	
	Persentase Rumah Layak Huni					96,62 %	97,26 %			96,62 %	97,26 %	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan . Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Terbangunnya Insfratraktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas.
 - b. Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan tutupan Lahan.
 - c. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
2. Sasaran Dinas Perumahan . Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman dengan indikator kinerja yaitu Presentase Permukiman Layak Huni, belum memenuhi target karena masih banyak lingkungan permukiman yang harus dibenahi
- b. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan
 - Untuk Indeks Kualitas Air (IKA) realisasi meningkat, karena dilakukan pengurangan jumlah sungai, sebelumnya pengujian dilakukan untuk 7 sungai, sekarang dikurangkan menjadi 5 sungai. Pengurangan ini merupakan penyesuaian, sesuai dengan Permen LHK No 27 Tahun 2021 tentang IKLH, yang menyatakan bahwa sungai yang dipantau mewakili 50% dari sungai yang ada di wilayah administrasi. Sekaligus dilakukan penyesuaian titik pantau untuk menentukan lokasi pengambil sampel pada sungai di Kota Padang Panjang
 - Untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) realisasi meningkat, karena pengujian dilakukan oleh KLHKRI, Dinas Perkim Lh hanya melakukan pemasangan dan pengambilan passive sampler pada titik pantau yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai jadwal pemantauan
 - Untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) realisasi meningkat, karena dilakukan penambahan digitasi terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tutupan Vegetasi lainnya dengan melakukan identifikasi tutupan lahan baru. Untuk itu selanjutnya data tersebut divalidasi oleh P3E Sumatera dan Dirjen PPKL KLHKRI sebagai tambahan data tutupan lahan baru Kota Padang Panjang
- c. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan indikator presentase Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.
- d. Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman dengan indikator presentase permukiman layak huni,

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator Pelaksana Urusan Pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup disadari bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun Pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terkait dengan bidang tersebut, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, perencanaan skala kota, maupun perencanaan OPD di Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah untuk urusan Perumahan Rakyat dan urusan Lingkungan Hidup Namun pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

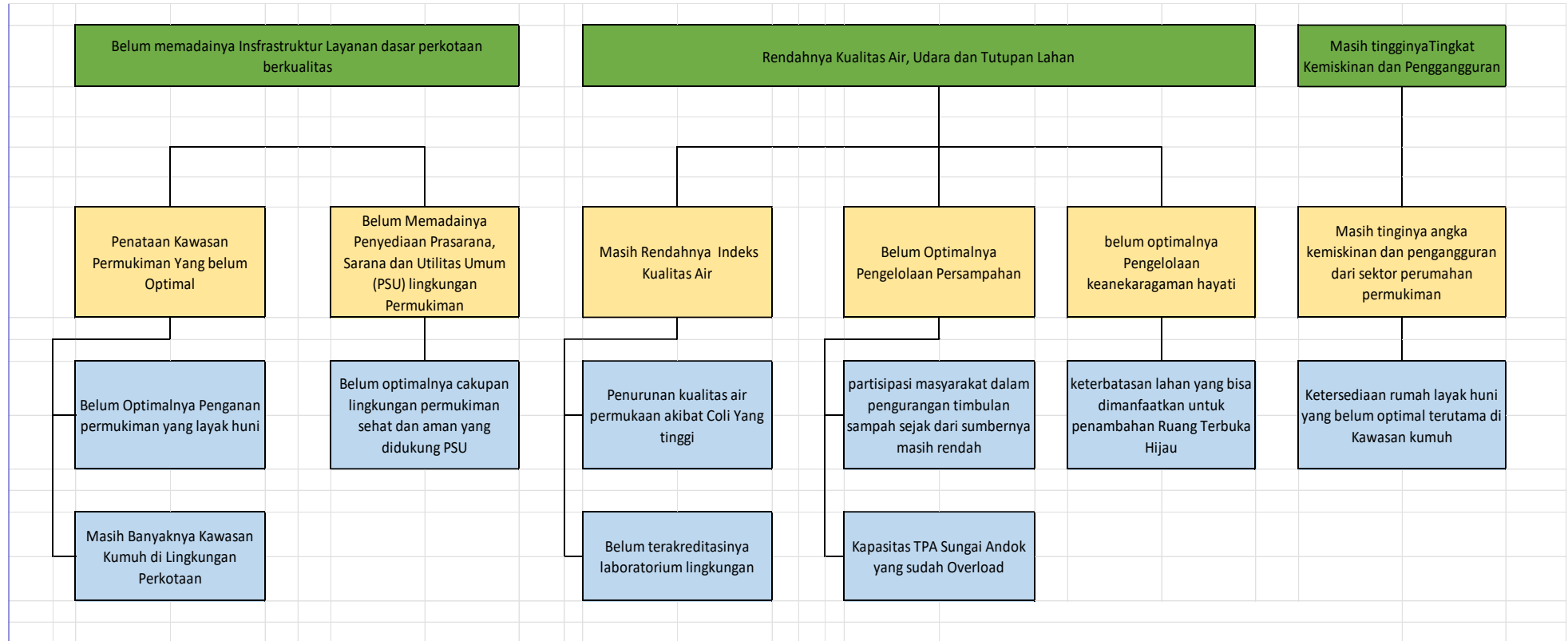
Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Renstra 2024-2026

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket
1	Infrastruktur Layanan dasar perkotaan berkualitas yang belum memadai	Penataan Kawasan Permukiman Yang belum Optimal	Belum Optimalnya Penganan permukiman yang layak huni	
			Masih Banyaknya Kawasan Kumuh di Lingkungan Perkotaan	
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) lingkungan Permukiman yang belum Memadai	Belum optimalnya cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung PSU	
2	Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Yang Masih Rendah	Indeks Kualitas Air yang Masih Rendah	Penurunan kualitas air permukaan akibat Coli Yang tinggi	
			Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan	
		Pengelolaan Persampahan yang Belum Optimal	partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya masih rendah	

			Kapasitas TPA Sungai Andok yang sudah Overload	
		Pengelolaan keanekaragaman hayati yang belum optimal	Terbatasnya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau	
3	Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang masih tinggi	Masih tinginya angka kemiskinan dan pengangguran dari sektor perumahan permukiman	Ketersediaan rumah layak huni yang belum optimal terutama di Kawasan kumuh	

Gambar 2.1
POHON MASALAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggul daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya ditengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah dengan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran, Layanan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Air, Udara Tutupan Lahan.

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni;
- b. Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman;
- c. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan;
- d. Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan;
- e. Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- f. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan.

Untuk menyelesaikan Isu tersebut diatas pada Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melaksanakan Program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh;
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU);
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
10. Program Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
11. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
13. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
14. Pengelolaan Persampahan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka

ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

Tabel 2.8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-6	13
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				14.857.561.416					19.043.088.588	4.185.527.172	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.857.561.416					19.043.088.588	4.185.527.172	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				6.490.857.475					8.508.614.752	2.017.757.277	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	5.830.422.195	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	7.739.672.122	1.909.249.927	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.707.571.395	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.961.557.320	1.253.985.925	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/bulan	4.707.571.395	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672 Orang/bulan	5.961.557.320	1.253.985.925	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	-	-	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	48 Paket	-	-	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	310.050.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	536.953.100	226.903.100	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	11.050.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10.354.200	(695.800)	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	91.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	100.475.400	9.475.400	

X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	13.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	26.747.500	13.747.500	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	195.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	399.376.000	204.376.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	70.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	114.949.602	44.949.602	
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	-	
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 paket	-	-	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	114.949.602	94.949.602	
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	(50.000.000)	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	511.372.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	635.959.100	124.587.100	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	51.532.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	86.081.500	34.549.500	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	459.840.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	549.877.600	90.037.600	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	231.428.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	490.253.000	258.824.200	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.428.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.690.000	30.261.200	

X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	173.525.000	73.525.000	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	46.010.000	26.010.000	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	229.028.000	129.028.000	
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Padang Panjang	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 persen	300.435.280	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Padang Panjang	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	84,00%	428.584.230	128.148.950	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	2 dokumen	10.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	2 dokumen	51.723.650	41.723.650	
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	5.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		(5.000.000)	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.723.650	46.723.650	
5.01.02.2.01.0002	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 Unit	90.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 Unit	43.030.000	(46.970.000)	
5.01.02.2.02	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	40.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	43.030.000	3.030.000	
5.01.02.2.02.0001	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	50.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	-	(50.000.000)	
5.01.02.2.03	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Laporan	200.435.280	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Laporan	333.830.580	133.395.300	
5.01.02.2.03.0003	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	200.435.280	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	333.830.580	133.395.300	

01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Padang Panjang	Persentase pengurangan kawasan kumuh	95,74%	110.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Padang Panjang	Persentase pengurangan kawasan kumuh	95,74%		(110.000.000)	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	2 dokumen	-	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	2 dokumen	-	-	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dokumen	-	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dokumen	-	-	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	-	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 Laporan	-	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 Laporan	-	(110.000.000)	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Laporan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Laporan		-	
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	110.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		(110.000.000)	
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Padang Panjang	Persentase Rumah Layak Huni	97,26%	50.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kota Padang Panjang	Persentase Rumah Layak Huni	97,26%	140.358.400	90.358.400	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	50.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	140.358.400	90.358.400	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	50.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	70 Unit Rumah	140.358.400	90.358.400	

01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11%	200.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11%	200.000.000	-
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang	2 kecamatan	200.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang	2 kecamatan	200.000.000	-
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	200.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	200.000.000	-
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.366.703.941	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.534.473.836	2.167.769.895
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.366.703.941	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				10.534.473.836	2.167.769.895
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Padang Panjang		100%	70.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Padang Panjang		100%	196.841.000	126.841.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang		-	-	Rencana Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kota Padang Panjang		-	-	-
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang		-		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang		-		-
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 Dokumen	70.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 Dokumen	196.841.000	126.841.000
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen		-
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	70.000.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	196.841.000	126.841.000

02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100%	338.864.040	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100%	552.115.210	213.251.170	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	308.864.040	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	522.115.410	213.251.370	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen		-	
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Dokumen	13.272.200	(11.727.800)	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	29.990.600	(9.400)	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	253.864.040	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	478.852.610	224.988.570	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	30.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	29.999.800	(200)	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	30.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	29.999.800	(200)	

02:11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Padang Panjang	Persentase luas RTH Publik	4,23%	1.779.878.101	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Padang Panjang	Persentase luas RTH Publik	4,23%	2.005.056.550	225.178.449
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	1.779.878.101	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2.005.056.550	225.178.449
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Padang Panjang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	1.759.878.101	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Padang Panjang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	1.995.234.750	235.356.649
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	20.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	9.821.800	(10.178.200)
02:11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Padang Panjang	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32%	45.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Padang Panjang	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32%	31.197.900	-13802100
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Padang Panjang	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan	4 fasyanke	20.000.000	Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Padang Panjang	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan	4 fasyanke	14.791.400	(5.208.600)
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	20.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	14.791.400	(5.208.600)
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	25.000.000	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	16.406.500	(8.593.500)
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	16.406.500	(8.593.500)

02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Padang Panjang	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	60%	60.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Padang Panjang	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	60%	22.543.500	-37456500
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100 persen	60.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100 persen	22.543.500	(37.456.500)
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha	30.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha	22.543.500	(7.456.500)
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	30.000.000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	-	(30.000.000)
02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kota Padang Panjang	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	50%	40.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kota Padang Panjang	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH	50%	19.999.850	-20000150
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	20.000.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	19.999.850	(150)
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	19.999.850	(150)

2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	20.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	1 Dokumen	-	(20.000.000)
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	20.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen		(20.000.000)
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Padang Panjang	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Padang Panjang	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	154.417.600	84417600
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	70.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	154.417.600	84.417.600
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	20.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	19.999.950	(50)
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	10.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	10.000.000	-
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	40.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	124.417.650	84.417.650
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	40.800.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Padang Panjang	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	97.542.700	56742700
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	1 kelompok	40.800.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	1 kelompok	97.542.700	56.742.700

2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	40.800.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	97.542.700	56.742.700
		Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup	1 dokumen			Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup	1 dokumen		-
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Padang Panjang	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	45.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Padang Panjang	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	24.600.000	(20.400.000)
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	45.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	24.600.000	(20.400.000)
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Dokumen	12.680.000	(7.320.000)
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	25.000.000	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	11.920.000	(13.080.000)
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Padang Panjang	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	5.877.161.800	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Padang Panjang	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	7.430.159.526	1552997726
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kota Padang Panjang	Persentase penanganan sampah	79 persen	5.852.161.800	Pengelolaan Sampah	Kota Padang Panjang	Persentase penanganan sampah	79 persen	7.430.159.526	1.577.997.726
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	20.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok	15.203.900	(4.796.100)

2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	-	(35.000.000)	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	950.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 Unit	2.439.735.236	1.489.735.236	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kota Padang Panjang	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	4.847.161.800	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kota Padang Panjang	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	4.975.220.390	128.058.590	
	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang				Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang				-	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kota Padang Panjang	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	1 Pihak Swasta	25.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kota Padang Panjang	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	1 Pihak Swasta	-	(25.000.000)	
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	(25.000.000)	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pada Musrenbang RKPD usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Usulan Program/kegiatan masyarakat yang berasal dari musrenbang dan hasil reses DPRD berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perkim LH
Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dalam Kondisi baik			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian			
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	48 Lokasi		
1	terganggunya pemakai jalan setapak yang berlobang dan licin sehingga menimbulkan genangan air di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 3 sebelum rumah herlina sampai herlina sampai sesudah devi wahyuni	Jl. Perintis Kemerdekaan RT 3 sebelum rumah herlina sampai sesudah devi wahyuni sepanjang 70 Meter , Balai-Balai, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	70.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Balai-Balai
2	jalan yang licin dan becek, menyebabkan warga yang melewati sering terjatuh/terpeleset, sehingga perlu peningkatan kualitas jalan setapak antara lain pemasangan paving slave di RT. 2 (V: 80m x 2m)	dari dekat depan rumah pak syafar sampai ke jl setapak dekat pandam pakuburan RT. 2 ,Silaing Atas, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	60.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Silaing Atas
3	terdapat kerusakan jalan setapak sehingga perlunya peningkatan kualitas jalan lingkungan pemukiman masyarakat antara lain pemasangan paving slab (V: 90m x 1.5m)	dari dekat rumah Yusni Sabarudin sampai ke dekat rumah Sudarmi RT. 9 ,Silaing Atas, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	90.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Silaing Atas

4	Adanya warga yang terjatuh/terpeleset saat berjalan dan yang mengendarai roda dua di sekitaran jalan setapak,	Jl. Bagindo Aziz Chan RT. 1 (disamping Lapau Panjang dengan panjang 20x06 meter), Tanah Hitam, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Tanah Hitam
5	Tumbuhnya Lumut Mengakibatkan Kondisi DAM Rusak maka diperlukan meplester DAM. dari rumah singgah jasmin lakemba sampai rumah Tya (dengan volume 200m ² di penurunan sebelum jembatan	Jl Rasuna Said RT 02 Kampung Manggis , Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Kampung Manggis
6	terganggunya pemakai jalan setapak yang berlobang dan licin di Jl. Adam BB RT 14 sebelum rumah buk farida sampai sesudah buk asmiar maka diperlukan peningkatan jalan setapak	Jl. Adam BB RT 14 sebelum rumah buk farida sampai sesudah buk asmiar dengan Volume sepanjang 20 Meter, Balai-Balai, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	40.000.000	Hasil Musrenbang Balai-Balai
7	belum bagusnya kualitas jalan lingkungan pemukiman warga maka perlu peningkatan kualitas jalan di lingkungan pemukiman warga Dari tepi jalan raya sampai ke depan rumah Dewi Kumala sari (dengan volume 50m ²	RT 18 Kampung Manggis, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kampung Manggis
8	Rawan kecelakaan bagi anak-anak yang bermain disepanjang jalan setapak RT. 04, maka dibutuhkan pembuatan vertikal garden	Depan rumah buk Yustini sampai ke depan rumah Yulismar RT. 004 (sepanjang 70 meter), Koto Katik, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	63.000.000	Hasil Musrenbang Koto Katik
9	Banyaknya riol yang rusak menyebabkan penyumbatan aliran air dan masuknya air ke rumah warga	Perumahan Aries RT. 005 (sepanjang 200 meter), Koto Katik, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	60.000.000	Hasil Musrenbang Koto Katik

10	Kondisi bangunan yang sudah tidak layak terutama atap genteng yang sudah banyak bocor sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat dan pada saat mengadakan pertemuan dengan organisasi masyarakat yang ada di Kelurahan seperti LPM, PKK, RT,FKPM dll akan sangat mengganggu apalagi saat hujan air tergenang di Aula tersebut dan kondisi genteng yang sudah berjuantaaian apalagi ada angin kencang disertai hujan lebat dengan ukuran 15 x 10 = 150 m ²	Jl. Adinegoro No.6 RT.5 ,Pasar Baru, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	195.000.000	Hasil Musrenbang Pasar Baru
11	Bulaan salah satu tempat penampung air yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penunjang kebutuhan air sehari-hari untuk kualitas air bulakan dari longsor tanah atau kapur maka dibutuhkan pendaman pinggir bulakan	Dekat Musholla Hidayatussalam RT.9 (Sepanjang 30 Meter), Koto Panjang, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	30.000.000	Hasil Musrenbang Koto Panjang
12	Kondisi drainase sudah banyak yg keropos dan rusak sehingga dibutuhkan perbaikan drainase bancah laweh	Dibelakang Gor Bancah Laweh atau Pinggiran landasan pacu kuda RT.10 (Sepanjang 350 Meter), Kota Panjang, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	100.000.000	Hasil Musrenbang Koto Panjang
13	Belum adanya saluran drainase pemukiman RT 02 maka dibutuhkan pembuatan drainase pemukiman RT 02	diantara Rumah warga di perumahan Gunung Saiyo RT.2 (Sepanjang 150 meter), Koto Panjang,Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Koto Panjang
14	Banyaknya jalan yang berlobang, rusak dan bergelombang, maka kami mengusulkan Perbaikan Jalan Lingkungan	Jl. Bagindo Aziz Chan RT 5 (Simpang Kampung KB sampai Bengkel Pak Jon sepanjang 100x2 meter), Balai- Balai, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	95.000.000	Hasil Musrenbang Tanah Hitam
15	Telah terjadinya longsor ketika hujan deras yang menimpa rumah warga karna pendaman tebing yang belum tuntas, maka perlu lanjutan pembangunan DAM tebing lingkungan	Jl. A Yani RT 10 (belakang rumah buk Nofrizi sampai belakang rumah Buk Rina) (sepanjang 20 x 0,4 x 5 Meter), Ngalau,Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	200.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau

16	Seringnya masyarakat terjatuh karna faktor jalan yang yang licin karna berlumut, maka perlunya peningkatan jalan pemukiman	RT 06 (Samping Isra Perabot) (sepanjang 50 meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
17	Naiknya bau tidak sedap ketika musim panas dari riol jalan mukhtar luthfi, maka perlunya penutupan riol untuk mengurangi bau tersebut	Sepanjang Jalan Muhtar Luthfi (sepanjang 200 meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	196.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
18	Pernah terjatuhnya anak-anak / masyarakat yang melewati jalan pemukiman lingkungan RT 11, maka dibutuhkan pemasangan pagar pengaman/vertikal garden	RT 11 (dari samping pos ronda sampai simpang pandam pakuburan) (sepanjang 50 Meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
19	Masih ada pengecoran jalan yang belum selesai mengakibatkan akses keluar masuk kendaraan terkendala, maka perlunya lanjutan pengecoran bahu jalan	Kompleks Perumahan Sago Residence RT 014 (kurang lebih 300 Meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
20	Seringnya masyarakat terjatuh karna faktor jalan yang yang licin karna berlumut, maka perlunya peningkatan jalan pemukiman	RT 09 (jalan samping rumah yetri anwar s/d rumah delfison lanjut ke samping rumah zuraida) (kurang lebih sepanjang 1,5 x 50 Meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	75.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
21	Tanah tebing yang runtuh kejalan pemukiman ketika hujan lebat karna pendaman tebing masih belum selesai, maka perlu pembangunan lanjutan pendaman tebing	RT 03 (tebing dari pendakian padang kelok sampai tami) (dengan volume kurang lebih 250 x 0,5 x 2,5 meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
22	terganggunya pemakai jalan setapak yang berlobang dan licin maka diperlukan peningkatan jalan setapak di Gang Murai RT 19 sebelum rumah dameri sampai sesudah rumah buk miloik dengan Volume sepanjang 70 Meter , Balai- Balai, Kota Padang Panjang	Gang Murai RT 19 sebelum rumah dameri sampai sesudah rumah buk miloik dengan Volume sepanjang 70 Meter , Balai- Balai, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Balai-Balai

23	Masih terkikisnya tebing di sekitar Paud Mawaddah yang berdampak kepada bangunan yang ada di atas tebing, maka perlu dilakukan pengedaman tebing	RT 01 (Dekat Paud Mawaddah) (sepanjang 20 meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
24	Terganggunya aktifitas belajar mengajar karna banyaknya masyarakat melalui lingkungan sekolah, maka perlunya pembuatan jalan khusus di atas irigasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran SMP 6	Irigasi di Samping SMPN 6 Padang Panjang (sepanjang 100 meter), Ngalau, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ngalau
25	Karena tidak adanya lahan untuk pembuatan taman untuk keindahan jalan dan lingkungan maka diperlukan pembuatan vertikal garden sekaligus plang selamat datang kelurahan Tanah Pak Lambik	Jl. Urip Sumoharjo RT 008 di simpang Mesjid Muhamadiyah 1 Paket, Tanah Pak Lambik, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	45.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pak Lambik
26	Jika hari hujan air meluap kejalan karena besarnya debit air dari RT.08 ke RT.10 dan tidak tertampung oleh saluran yang ada supaya mencegah banjir agar tidak masuk ke rumah warga karena drainase yang dangkal dan kecil, maka diusulkan untuk pembangunan/perbaikan drainase lingkungan jalan pendustrian sampai dengan minang kabau village	RT.10 Kelurahan Silaing Bawah , Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	85.000.000	Hasil Musrenbang Silaing Bawah
27	Akses jalan yang tidak memadai untuk transportasi bagi masyarakat/warga dari RT. 22 ke RT.06, maka diusulkan perbaikan jalan setapak dekat rumah pak rusli sampai dekat rumah pak helendra syamsu, dengan volume 60 meter,	RT.22 Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	110.000.000	Hasil Musrenbang Silaing Bawah
28	Akses jalan yang tidak nyaman bagi warga ketika hari hujan jalan menjadi licin karena jalan masih tanah, untuk itu usulkan pembangunan/perbaikan jalan lingkungan dekat rumah pak zainul arifin sampai dekat rumah pak jhon elvis, dengan lebar 3 meter,	RT. 05 Kelurahan Silaing Bawah (Belakang Toko Soto Laris), Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	120.000.000	Hasil Musrenbang Silaing Bawah

29	Pengerjaan trotoar yang terbengkalai sehingga perlu dilanjutkan untuk penyeragaman dan keindahan trotoar, dengan usulan lanjutan pembangunan/perbaikan trotoar jalan RPH dengan volume 150 meter,	RT.09 Kelurahan Silaing Bawah , Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	135.000.000	Hasil Musrenbang Silaing Bawah
30	Sering terjadi longsor tanah ke jalan SMK N 2 Padang Panjang samping perumahan dokter RSUD Padang Panjang yang sangat beresiko bagi pengguna jalan, maka dibutuhkan pengedaman tebing	Samping perumahan dokter RSUD RT 13 sepanjang 150 meter, Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	300.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
31	Belum adanya dam pengaman tebing disamping perumahan dokter RSUD Kota Padang Panjang bawah kubang pada musim hujan sering terjadi tanah longsor, maka dibutuhkan pengedaman tebing,	Bawah Kubang Tabek Gadang RT 11 samping perumahan dokter RSUD sepanjang 50 meter, Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	80.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
32	Belum adanya dam pengaman tebing dibelakang rumah warga antara rumah Nuriah dan rumah Ira Syafira Tabek Gadang Dalam arah SD N 10 PPT pada musim hujan sering terjadi tanah longsor, maka dibutuhkan pengedaman tebing,	Belakang rumah Nuriah Tabek Gadang dalam RT.08, sepanjang 100 meter, Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	75.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
33	Belum adanya pengecoran bahu jalan yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, maka dibutuhkan pembuatan bahu jalan	Jalan lingkaran tanjung RT 10 , sepanjang 200 meter, Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	75.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
34	Warga kesulitan untuk akses keluar-masuk kompleks dikarenakan jalan berlubang dan sudah rusak maka diperlukan perbaikan jalan di perumahan amanah	Perumahan Amanah (Sepanjang 300 X 4 Meter), Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting

35	Belum adanya jalan yang layak bagi warga untuk keluar masuk perumahan dikarenakan jalan berlubang dan rusak maka dibutuhkan perbaikan jalan di perumahan Villa Azizi	Perumahan Villa Azizi, Sepanjang 300 Meter, Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
36	Belum adanya jalan yang memadai dari samping Komplek Perumahan Dokter menuju Pondok Sayur dikarenakan jalan masih tanah dan belum layak untuk dilewati, maka dibutuhkan pengecoran jalan dengan anggaran 150.000.000 (P2)	Jalan Sangku ke Pondok Sayur RT 13, sepanjang 300 Meter, Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
37	Belum adanya dam pengaman pinggir sungai dibawah Jembatan Bukit Kandung dekat rumah Yeni Fitria yang mengakibatkan terkikisnya pinggir sungai, Maka dibutuhkan dam pinggir sungai	Jembatan Bukit Kandung RT 09, sepanjang 50 Meter, Ganting, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ganting
38	Kondisi bahu jalan saat ini masih tanah yang menyebabkan air tergenang, berlumut dan licin terutama pada musim hujan maka diperlukan pengecoran bahu jalan	Depan warung Pak Met sampai depan rumah Buk Yus Karim RT.04 (sepanjang 200 x 1 meter).Guguk Malintang, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Guguk Malintang
39	Coran Jalan Sudah Banyak Yang Rusak / Pecah / Terkelupas, maka diperlukan Peningkatan Jalan Setapak,	RT 5 Dimulai Dari Rumah Yusnizar Sampai Rumah Hermina Yanti sepanjang 100 M, Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	75.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ekor Lubuk
40	Jalan Tersebut Belum Ada Pengecoran, Masih Berdasarkan / Beralaskan Batu, maka diperlukan Peningkatan Jalan Setapak,	RT 7 Mulai Simpang Guak Nuang Sampai Mushalla Fajar Islam, sepanjang 150x 4 M, Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ekor Lubuk
41	Kondisi permukaan jalan yang sudah banyak rusak sehingga dibutuhkan Peningkatan kualitas permukaan jalan lingkungan menuju Masjid Nurul Hidayah	Karekap RT 15 (sepanjang 50 meter), Koto Panjang, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	30.000.000	Hasil Musrenbang Koto Panjang

42	kondisi Jalan yg sempit dan kendaraan yang banyak sehingga diperlukan pengecoran bahu jalan sebagai akses pejalan kaki	Komplek Aski I, RT. 14 (sepanjang 150 meter),Koto Panjang, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Koto Panjang
43	Jalan Sekarang Belum Dilaksanakan Pengerasan Dan Pengecoran Tetapi Sudah Dimanfaatkan Warga Rehab Jalan, maka diperlukan Pembangunan jalan,	RT 11 jalan perumahan batu runcing sepanjang 75 x 5M, Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	200.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Ekor Lubuk
44	Jalan lingkung tidak layak di gunakan karena masih tanah dan berbatu sehingga di perlukan peningkatan jalan lingkung	Samping Lapangan Volly RT 13 (sepanjang 30 x 3 meter), Guguk Malintang, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Guguk Malintang
45	Jalan setapak banyak yang rusak, maka dibutuhkan peningkatan kualitas permukaan jalan	Solok Batuang RT.9 dari depan Rumah In sampai depan rumah Asnimar (panjang 100 meter) , Sigando,Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	200.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Sigando
46	Rawan longsor yang berdampak kepada rumah warga dan Riol jalan, maka dibutuhkan pembuatan DAM dan rehab Riol dengan anggaran 150jt (P1)	Dari depan rumah syofida eni sampai ke dekat warung nurfahmi RT.4 (panjang 75 meter tinggi 2 meter), Sigando,Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	150.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Sigando
47	Banyaknya pejalan kaki yang terjatuh karena jalan setapak yang sudah licin dan berlumut, maka dibutuhkan peningkatan kualitas permukaan jalan	Dari depan Kantor Lurah sampai dekat rumah Deni RT. 006 (panjang 100 meter), Sigando,Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Sigando
48	Banyaknya pejalan kaki yang terjatuh karena jalan setapak yang sudah licin dan berlumut, maka dibutuhkan peningkatan kualitas permukaan jalan	Dari samping rumah gadang DT Tianso sampai MCK Batang Timbarau RT 02 (panjang 50 meter), Sigando, Kota Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Sigando

2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Rumah Layak Huni			
	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab</i>			
	<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>			
1	adanya masyarakat yang memiliki rumah dengan kondisi rusak berat maka diperlukan rehab rumah	Jl. Ar Hakim RT 9 (Rumah Buk Nurmilus) dengan Volume 1 Unit , Balai-Balai, Kota Padang Panjang	Jumlah Rumah tidak Layak yang direhab	1 Lokasi	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Balai-Balai
2	Kondisi rumah An. EFFENDI yang sudah tidak layak huni dinding yang sudah retak atap banyak yang bocor kondisi lantai yang sudah pecah-pecah pada saat hujan lebat air masuk kedalam rumah mengakibatkan adanya genangan di lantai rumah. Volume 4x12=48m ² .	Jl. Khatib Sulaiman No.82 RT.03, Pasar Baru,Kota Padang Panjang (rumah an. Effendi)	Jumlah Rumah tidak Layak yang direhab	1 Lokasi	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pasar Baru
3	Kondisi rumah an.Basri yang sudah tidak layak huni dinding yang sudah keropos kurangnya ventilasi udara karena jendela yang tidak pernah dibuka disebabkan adanya 2 orang anak disabilitas mental yang tidak boleh keluar dari rumah. Volume (5x10=50m ²)	Jl. Khatib Sulaiman No.80 RT.03 , Pasar Baru, Kota Padang Panjang (rumah an. Basri)	Jumlah Rumah tidak Layak yang direhab	1 Lokasi	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pasar Baru
4	Kondisi Rumah An. LEDY HANDAYANI atap depan, belakang, dan kamar yang sudah bocor dan dinding kayu yang sudah lapuk dan rumah tersebut juga dipergunakan untuk usaha berjualan tiap hari.Volume 6x10=60m ²	Jl. Adinegoro No.35 RT.04 , Pasar Baru,Kota Padang Panjang (rumah an. Ledy Handayani)	Jumlah Rumah tidak Layak yang direhab	1 Lokasi	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pasar Baru

5	Rumah tidak mempunyai WC An. ARNIWATI, Kondisi atap yang sudah bocor dan dinding kayu yang sudah lapuk lalu lantai kamar mandi yang sudah hancur menimbulkan aroma tidak sedap. dengan volume 6x15=90m ²	Jl. Adinegoro No.373/27 RT.04 , Pasar Baru,Kota Padang Panjang (rumah An.Arniwati)	Jumlah Rumah tidak Layak yang direhab	1 Lokasi	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pasar Baru
6	Kondisi Rumah An. SUHENAH atap yang sudah bolong/bocor lantai papan lapuk, dinding/kosen keropos dan dinding kayu yang sudah lapuk karna usia bangunan yang sudah tua. dengan volume 5x12=60m ²	Jl. Adinegoro RT.04 , Pasar Baru, Kota Padang Panjang (rumah An. Suhenah)	Jumlah Rumah tidak Layak yang direhab	1 Lokasi	20.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pasar Baru
	PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)		Persentase Luas RTH Publik	1 Lokasi		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola			
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			
1	Belum adanya Taman Literasi sebagai ruang hijau terbuka untuk publik ,maka dibutuhkan pembuatan taman literasi	Kantor Lurah Tanah Pak Lambik RT 003 1 paket, Kota Padang Panjang	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lokasi	100.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Tanah Pak Lambik
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Pengelolaan Sampah			
	Pengelolaan Sampah		Persentase penanganan sampah			
	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional			
1	Terganggunya pengangkutan sampah dari Kelurahan ke TPA Sungai Andok karena bentor sudah tidak layak jalan bentor seandainya bentor tersebut diperbaiki dana perbaikan tidak tersedia dan biaya perbaikinya lebih tinggi. Maka disarankan untuk pengadaan bentor.Volume 1 Unit.	Kelurahan Pasar Baru , Kota Padang Panjang	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	1 Lokasi	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pasar Baru

2	Kelurahan Pasar Baru belum/tidak memiliki Gerobak sampah, saat petugas akan mengangkat sampah dari gang ke gang terpaksa meminjam dulu ke kelurahan lain sehingga menimbulkan sampah menumpuk dan mengganggu untuk kenyamanan masyarakat karena aroma sampah yang menyengat. Volume 1 buah	Kelurahan Pasar Baru , Kota Padang Panjang	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Lokasi	7.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Pasar Baru
	<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>		<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>			
3	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemilahan dan pemilihan sampah organik dan anorganik , maka diperlukan Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga organik dan anorganik sebanyak 1 Kelompok	Aula Kantor Lurah Bukit Surungan, Kota Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak yang terlibat aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Persampahan	1 Lokasi	30.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Bukit Surungan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna

menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024. (menunggu finalisasi RKP 2025)

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan

Misi	Tujuan	Sasaran
infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan		Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta

nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02	60,02
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00
		6	LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
	berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan		Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74
				LPE sektor akomodasi makan dan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84
		15	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 5 (lima). yaitu “Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas”, Indikatornya Indeks Kualitas Layanan (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan sasaran Terbangunnya Insfratraktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas dan Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan, dengan indikator yang akan dicapai: Nilai IKLI dan NILai IKLH

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas.

3.1.4. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Ditingkat Kementerian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, maka dalam Renstra Kementerian/ Lembaga tidak lagi mencantumkan visi misi tersendiri, melainkan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Pembangunan Nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda.

1. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga

a. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditingkat Nasional, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Renstra Kementrian PUPR yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020. Secara umum tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini terkait bidang Perumahan dan Permukiman adalah peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipasif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara sasaran strategis yang terkait dengan bidang Perumahan dan Permukiman adalah Meningkatnya penyediaan akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator kinerja :

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
2. Persentase pemenuhan kebutuhan layak huni

b. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.63/Menlhk-Setjen/Set.1/10/2019. Tujuan pembangunan yang dirumuskan KLHK untuk Tahun 2020-2024 adalah

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu:

(1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

2. Telaah Renstra Provinsi

a. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2017 ditangani oleh OPD baru yaitu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Visi “Mewujudkan Permukiman layak huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola yang Berkeadilan”. Sejalan dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian PUPR, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air yang bersih dan baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman,
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan,
4. Meningkatkan Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yang memiliki keselarasan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman di daerah yaitu :

1. Meningkatkan infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan;
3. Meningkatnya kinerja Organisasi.

Sementara sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman di daerah adalah :

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator Persentase Peningkatan PSU Permukiman sebesar 20% pada tahun 2026;
2. Meningkatnya kualitas perumahan dengan indikator Persentase Rumah Layak huni bagi Masyarakat Korban Bencana sebesar 100% pada tahun 2026 dan Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi sebesar 100% pada tahun 2026.
3. Meningkatnya fasilitasi penatagunaan tanah dengan indikator persentase masalah pertanahan yang ditangani sebesar 100% pada tahun 2026;
4. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB di tahun 2026.

b. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disusun pada Tahun 2021 seiring dengan dilantiknya Kepala Daerah Periode 2021-2026.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah : “Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas”.

Tujuan tersebut kemudian diuraikan menjadi sasaran strategis jangka menengah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penataan lingkungan hidup, dengan indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan sebesar 99% di Tahun 2026.
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator persentase penurunan beban pencemaran sebesar 2,5% di Tahun 2026, Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan sebesar 0,05% di tahun 2026.
3. Terwujudnya optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3, dengan indikator persentase penanganan sampah sebesar 64% di tahun 2026, persentase pengurangan sampah sebesar 25% di tahun 2026 serta jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun) sebesar 882.554 ton di tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas dan Fungsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yaitu :

1. Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas
2. Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan
3. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman
2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
DINAS PERKIM LH Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tunjuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Terbangunnya Insfrastuktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		IKLI Perkim	96,85	96,9	96,92
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	Presentase Permukiman Layak Huni	98,80	99,52	100
2	Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan		Indek Kualitas Air	46,07	46,50	47,25
			Indek Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	56,18
			Indek Kualitas Udara	91,29	91,29	91,29
		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	85	90	90
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran		Angka Kemiskinan	5,14	4,99	4,85
		Menurunnya Angka Kemiskinan dari Urusan Perumahan Permukiman	Presentase Permukiman Layak Huni	98,80	99,52	100

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

- c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - 1) Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- 3. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- 5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - 1) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
- 6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- 7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahn Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Penyimpanan sementara Limbah B3.
 - 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
 - b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

9. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - 3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

13. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - a. Pengelolaan Sampah
 - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 3) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Padang Panjang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				27.754.924.838				15.338.412.096
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.416.655.152				6.956.708.155
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		90,00%	7.492.876.527			90,00%	6.296.272.875
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu		100 persen	5.961.557.320			100 persen	4.728.571.395
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658 Orang/bulan	5.961.557.320	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		672 Orang/bulan	4.728.571.395
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	-			100 persen	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	-			0 Paket	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90persen	477.074.505			90persen	356.557.500
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.104.800	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		8 Paket	12.707.500
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.548.500	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	72.215.600	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		8 Paket	104.650.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	10.564.300	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	20.438.805	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		24 Paket	14.950.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	- Kota Padang Panjang, Semua	12 Paket	934.500	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kel/Desa						
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	334.393.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		24 Laporan	224.250.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	29.875.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		100 persen	114.949.602			100 persen	468.343.180
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0 Unit		Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit		Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		3 Unit	298.343.180
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	114.949.602	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		3 Unit	20.000.000
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit		Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		3 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 persen	613.864.100			90 persen	511.372.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	29.454.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		60 Laporan	51.532.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	34.532.500	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	441.476.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		24 Laporan	459.840.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	108.401.600	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik		95 persen	325.431.000			95 persen	231.428.800
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	41.690.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		1 Unit	11.428.800
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	139.480.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		12 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	- Kota Padang Panjang,	2 Unit	34.045.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 Unit	31.330.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		30 Unit	20.000.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	3.990.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2Unit	44.888.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		3 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.008.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)			
01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani		100,00%	428.584.230			100,00%	300.435.280
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah		2 dokumen	51.723.650			2 dokumen	10.000.000
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah		1 Dokumen				1 Dokumen	5.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Susun dan Rumah Khusus	Susun, dan Rumah Khusus							
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		1 Dokumen	51.723.650	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	petugas administrasi pemetaan perumahan rawan bencana	1 Dokumen	5.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah		4 unit	43.030.000			4 unit	90.000.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	43.030.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		2 Unit Rumah	40.000.000
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	-	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		2 Unit Rumah	50.000.000
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun		1 Laporan	333.830.580			1 Laporan	200.435.280
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	333.830.580	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Operasional rusunawa + gaji 6 org THL	1 Laporan	200.435.280

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh		95,74%	-			100,00%	110.000.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia		- dokumen	-			- dokumen	-
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	- Dokumen	-			- Dokumen	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		- Dokumen	-			- Dokumen	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh		1 laporan	-			1 laporan	110.000.000
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	-			1 Laporan	110.000.000
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni		97,26%	3.382.858.400			97,90%	50.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab		70 unit	3.382.858.400			70 unit	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Unit Rumah	3.382.858.400	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		70 Unit Rumah	50.000.000
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik		87,11%	5.112.335.995			87,98%	200.000.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian		2 kecamatan	5.112.335.995			2 kecamatan	200.000.000
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	5.112.335.995	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		2 Lokasi	200.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11.338.269.686				8.356.703.941
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan		100,00%	196.841.000			100,00%	-
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun		1 dokumen	196.841.000			0 dokumen	-
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	- Semua Kecamatan,	- Dokumen				- Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
		Kabupaten/Kota yang Disusun	Semua Kel/Desa						
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	196.841.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		- Dokumen	
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		100,00%	468.675.210			100,00%	368.864.040
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan		2 jenis	438.675.410			2 jenis	348.864.040
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen				0 Dokumen	-
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan		1 Dokumen	-	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Penyusunan dokumen IKLH	1 Dokumen	25.000.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	29.990.600	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Pendataan Pengusulan lokasi proglim dan reward	1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	408.684.810	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Operasi onal Laboratorium LH + gaji THL	2 Dokumen	273.864.040
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan		1 jenis	29.999.800			1 jenis	20.000.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	29.999.800	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Sosialisasi pengelolaan Limbah B3	4 Laporan	20.000.000
02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik		4,23%	1.995.234.750			4,23%	1.779.878.101
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola		2 kecamatan	1.995.234.750			2 kecamatan	1.779.878.101
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53 Ha	1.995.234.750	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Keg Rutin RTH + gaji THL operasional pertama nan 46 Org	53 Ha	1.759.878.101
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	-	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Peningkatan kapasitass petugas taman	40 Orang	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3		32,00%	31.197.900			35,00%	45.000.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan		24 fasyankes	14.791.400			26 fasyankes	20.000.000
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	14.791.400	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	20.000.000
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3		2 kali	16.406.500			2 kali	25.000.000
2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.406.500	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Pelatihan pengelolaan LB3	1 Dokumen	25.000.000
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki		60,00%	22.543.500			65,00%	60.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan							
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi		100 persen	22.543.500			100 persen	60.000.000
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup p	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Badan Usaha	22.543.500	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		40 Badan Usaha	30.000.000
2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya		4 Orang				5 Orang	30.000.000
02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH		100,00%	-			100,00%	40.000.000
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan		1dokumen	-			1dokumen	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH							
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	sosilaisi keberadaan MHA	1 Dokumen	20.000.000
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan		1 dokumen				1 dokumen	20.000.000
2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		1 Dokumen				1 Dokumen	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		100,00%	154.417.600			100,00%	70.000.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana		3 jenis kegiatan	154.417.600			3 jenis kegiatan	70.000.000
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	19.999.950	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Pendampingan oleh kader adiwiyat a dan evend lingkungan	3 Dokumen	20.000.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Orang	10.000.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)	Dialog interaktif penyebaran informasi terkait lingkungan hidup	16 Orang	10.000.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	124.417.650			1 Lembaga	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		1 Jenis	93.300.200			1 Jenis	40.800.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya		1 kelompok	93.300.200			1 kelompok	40.800.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Entitas	93.300.200	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		1 Entitas	40.800.000
		Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup		1 dokumen				1 dokumen	
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani		100,00%	12.680.000			100,00%	50.000.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		5dokumen	12.680.000			5dokumen	50.000.000
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	12.680.000	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	20.000.000
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	5 Dokumen	-	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		5 Dokumen	30.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
	kewenangan kabupaten/kota	kewenangan kabupaten/kota	Semua Kel/Desa						
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah		98,00%	8.363.379.526			98,00%	5.927.161.800
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah		79 persen	8.363.379.526			78 persen	5.902.161.800
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kelompok	45.203.900	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		7 Kelompok	20.000.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	-			1 Dokumen	35.000.000
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	2.487.735.236	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		23 Unit	1.000.000.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15000-20000 Ton	5.830.440.390	Dana Tranfer Alokasi Umum (DAU)		15000-20000 Ton	4.847.161.800

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi		1 pihak swasta				1 pihak swasta	25.000.000
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		1 Laporan				1 Laporan	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Dinas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 3 (tiga) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan daerah. Namun secara khusus, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota” dan indikator sasaran “Indeks kualitas perencanaan pembangunan dan Indeks Inovasi Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			27.091.340.628,00							14.205.129.226,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.161.755.752,00							6.207.289.325,00		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			16.161.755.752,00							6.207.289.325,00		
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		90 %	7.237.977.127,00					90 %	5.661.854.045,00		
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu		100 persen	5.961.557.320,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	100 persen	4.728.571.395,00		
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	658 Orang/ bulan	5.961.557.320,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	672 Orang/ bulan	4.728.571.395,00		
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		90 persen	433.152.205,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur	OPD	90 persen	318.358.850,00		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah						
													dan lingkungan hidup yang berkelanjutan						
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	6.104.800,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	8 Paket	7.624.500,00				
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	72.215.600,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	8 Paket	90.184.350,00				
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	20.438.805,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	24 Paket	13.075.000,00				
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	334.393.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutanMeningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	24 Laporan	207.475.000,00				
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90 persen	114.949.602,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	90 persen	20.000.000,00				
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	7 Unit	114.949.602,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur	OPD	3 Unit	20.000.000,00				

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional				Daerah	
								Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM		dan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 persen	470.930.000,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	90 persen	398.793.000,00	
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	29.454.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	60 Laporan	29.605.000,00	
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	441.476.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	24 Laporan	369.188.000,00	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		95 persen	257.388.000,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	95 persen	196.130.800,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	41.690.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	1 Unit	11.428.800,00	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	139.480.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	12 Unit	80.380.000,00	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 Unit	31.330.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutanMeningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	30 Unit	17.425.000,00			
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	44.888.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	3 Unit	86.897.000,00			
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani		100 %	428.584.230,00					100 %	295.435.280,00			
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah		2 dokumen	51.723.650,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 dokumen	5.000.000,00			
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	51.723.650,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	5.000.000,00			
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah		4 unit	43.030.000,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat berpenghasilan rendah	4 unit	90.000.000,00			

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah						
						Kabupaten/Kot a													
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit Rumah	43.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat berpenghasil an rendah	2 Unit Rumah	40.000.000,00				
	1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota													
						Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit Rumah	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat berpenghasil an rendah	2 Unit Rumah	50.000.000,00				
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 dokumen	333.830.580,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 dokum en	200.435.280,00				
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	333.830.580,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Laporan	200.435.280,00				
3	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni		97,26 %	3.382.858.400,00					97,26 %	50.000.000,00			
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	3.382.858.400,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	70 unit	50.000.000,00				
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Unit Rumah	3.382.858.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	70 Unit Rumah	50.000.000,00
4	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik		87,11 %	5.112.335.995,00					87,11 %	200.000.000,00
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian		2 kecamatan	5.112.335.995,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 kecamatan	200.000.000,00
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lokasi	5.112.335.995,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 Lokasi	200.000.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.929.584.876,00						7.997.839.901,00
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				10.929.584.876,00						7.997.839.901,00
5	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan		100 %	196.841.000,00					100 %	0,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen KLHS yang disusun		1 dokumen	196.841.000,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	0 dokum en	0,00		
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang												
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	196.841.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	- Dokum en	0,00		
6	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		100 persen	59.990.400,00					100 persen	95.000.000,00		
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan		2 jenis	29.990.600,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutanMeningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 jenis	75.000.000,00		
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut												
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	-	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00		
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	29.990.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	1 Dokum en	50.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
							Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM		dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			
	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Kegiatan	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	25.000.000,00
	2	11	03	2.02		Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan		1 jenis	29.999.800,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 jenis	20.000.000,00
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	29.999.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	4 Laporan	20.000.000,00
7	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik		4,23 %	1.995.234.750,00					4,23 %	1.779.878.101,00
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kot a	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola		2 kecamatan	1.995.234.750,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 kecamatan	1.779.878.101,00
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	53 Ha	1.995.234.750,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	53 Ha	1.759.878.101,00		
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
							Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	0,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutanMeningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	40 Orang	20.000.000,00		
8	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifika si lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3		32 %	31.197.900,00					32 %	45.000.000,00		
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan		24 fasyankes	14.791.400,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	26 fasyank es	20.000.000,00		
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3												
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	14.791.400,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00		
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi		2 kali	16.406.500,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan	OPD	2kali	25.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
						dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pengelolaan limbah B3						berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan												
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	16.406.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	1 Dokumen	25.000.000,00		
9	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan		60 %	22.543.500,00					60 %	30.000.000,00		
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi		100 persen	22.543.500,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	100 persen	30.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
						dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						dan lingkungan hidup yang berkelanjutan						
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup												
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Badan Usaha	22.543.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutanMeningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		30.000.000,00		
10	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH		100 %	0,00					100 %	20.000.000,00		
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH		1 dokumen	0,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 dokumen	20.000.000,00		
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00
11	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		100 %	154.417.600,00					100 %	70.000.000,00
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana		3 jenis kegiatan	154.417.600,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	3 jenis kegiatan	70.000.000,00
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	19.999.950,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	3 Dokumen	20.000.000,00
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Orang	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	16 Orang	10.000.000,00
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat										
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	124.417.650,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Lembaga	40.000.000,00
12	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		1 Jenis	93.300.200,00					1 Jenis	40.800.000,00
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya		1 kelompok	93.300.200,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 kelompok	40.800.000,00
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Entitas	93.300.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1 Entitas	40.800.000,00
13	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani		100 %	12.680.000,00					100 %	50.000.000,00

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		5 dokumen	12.680.000,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	5 dokum en	50.000.000,00		
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota												
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditan gani	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Pengadua n	12.680.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	5 Pengad uan	20.000.000,00		
	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota												
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Perkara	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	5 Perkara	30.000.000,00		
14	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHA N	Persentase pengelolaan sampah		98 %	8.363.379.526,00					98 %	5.867.161.800,00		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah		79 persen	8.363.379.526,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	78 persen	5.867.161.800,00		
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan												
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	7 Kelompok	45.203.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	7 Kelomp ok	20.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM		dan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Unit	2.487.735.236,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutanMeningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	23 Unit	1.000.000.000,00	
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional											
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten /kota atau TPA/TPST Regional	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15000-20000 Ton	5.830.440.390,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	15000-20000 Ton	4.847.161.800,00	
						UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP				663.584.210,00						459.939.690,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				254.899.400,00						186.075.650,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				254.899.400,00						186.075.650,00	
15	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		90 %	254.899.400,00					90 %	186.075.650,00	
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		90 persen	43.922.300,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	90 persen	38.198.650,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	2.548.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	8 Paket	5.083.000,00		
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	10.564.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	8 Paket	14.465.650,00		
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	934.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	24 Paket	1.875.000,00		
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	29.875.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	24 Laporan	16.775.000,00		
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 persen	142.934.100,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	90 persen	112.579.000,00		
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	34.532.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	60 Laporan	21.927.000,00		
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	108.401.600,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	24 Laporan	90.652.000,00
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		95 persen	68.043.000,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	95 persen	35.298.000,00
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	34.045.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	12 Unit	19.620.000,00
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	3.990.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	30 Unit	2.575.000,00
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.008.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	3 Unit	13.103.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				408.684.810,00						273.864.040,00
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				408.684.810,00						273.864.040,00
16	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan		100 %	408.684.810,00					100 %	273.864.040,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
								Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Nasional	Daerah						
						KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	atau kerusakan lingkungan hidup												
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan		2 jenis	408.684.810,00		-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 jenis	273.864.040,00			
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	408.684.810,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	2 Dokumen	273.864.040,00			
	J U M L A H										27.754.924.838,00					14.665.068.916,00			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang selama tahun 2025.

Terlaksananya Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 5 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004